



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIPAMBUAN
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
Rofiatul Adawiyah
022117137

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2021**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIPAMBUAN
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA, CSEP., QIA., CFE.)

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIPAMBUAN
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari: Rabu 07 Juli 2021

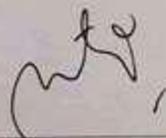
Rofiatul Adawiyah

022117137

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE.,MSi.,
CMA.,CAPM)



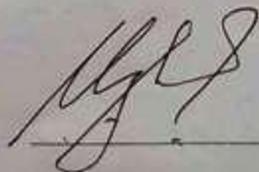
Ketua Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak, MM, CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edi, Drs.,Ak.,MM)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiatul Adawiyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 022117137
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan Bogor.

Bogor, 7 Juli 2021

MAERAI Rp10.000,-

Rofiatul Adawiyah
022117137

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pakuan, tahun 2021 Hak Cipta
dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Rofiatul Adawiyah. 022117137. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan Yohanes Indrayono dan Sigit Edi.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. (2) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. (3) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan teknik penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil uji t secara parsial nilai t hitung Transparansi (X_1) sebesar 2.557 dengan signifikan ($0,012 < 0,05$) dan nilai t_{tabel} sebesar 1.660, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.557 > 1,660$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Pengaruh Akuntabilitas (X_2), dan nilai t hitung Akuntabilitas sebesar 2.526 dengan signifikan ($0,013 < 0,05$) dan nilai t_{tabel} sebesar 1.660, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.526 > 1,660$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Hasil uji F secara simultan variabel independen memiliki $sig < 0,05$ yakni 0.000 dengan demikian nilai F_{hitung} 11.749 $> F_{tabel}$ 3,09. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pemberdayaan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan skripsi ini adalah adalah **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat banyak bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulsi selama menyusun skripsi.
2. Keluarga Peneliti yang terkasih, Ayahanda Siswaji, Ibunda Adawiyah, Adik Muhamad Azril Ilham, Muhammad Zaid Agil. Mereka adalah harta yang paling berharga, yang telah berperan mengajarkan, mengingatkan, memberikan nasihat, selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan materil, perhatian dan kasih sayang yang tidak terhingga.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., CSEP.,QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

6. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak, MM, CA. selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak Sigit Edi, Drs.,M.M. selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
9. Kepada teman-teman kelas D Akuntansi 2017 yang telah memberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan.
10. Kepada teman-teman kelas konsenterasi Akuntansi Sektor Publik 2017 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Nur Safitri, Annisa Nurfadhilah, Mega Ayu Lestari, dan M. Fachrudin yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, motivasi dan banyak kata yang tak bisa penulis utarakan melalui kalimat ini.
12. Kepada Aisyah, Dilah, Fadlan, Fadli, Rahmat Hidayat, Khairun Nissa, yang selalu membantu dan memberikan dukungan, semangat dan masukan kepada penulis.
13. Seluruh responden yang terlibat selama penelitian berlangsung.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi

pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Peneliti berharap penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mambentu proses belajar mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, serta dapat memberikakn pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, 07 Juli 2021

Penulis,

Rofiatul Adawiyah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah Perumusan Masalah dan	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Desa	8
2.1.1. Pemerintahan yang baik (Good Governance).....	8
2.2. Dana Desa.....	9

2.2.1. pengertian Dana Desa	9
2.3.3. Tujuan Dana Desa	10
2.3.1. pengertian Transparaan	11
2.3.2. Prinsip Transparansi	12
2.3.3 Indikator Transparansi	13
2.4. Akuntabilitas	13
2.4.1. Pengertian Akuntabilitas.....	13
2.4.2 Indikator akuntabilitas	14
2.5. Pemberdayaan masyarakat	15
2.5.1. Pengertian Pemberdayaan masyarakat.....	15
2.5.2 Indikator pemberdayaan masyarakat	18
2.6. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	18
2.6.1. Penelitian Terdahulu	18
2.6.2. Kerangka Pemikiran	24
2.7. Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis penelitian	26
3.2. Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian	26
3.3. Jenis dan sumber data penelitian	27
3.4. Operasionalisasi Variabel	28
3.5 Populasi dan Sampel	29
3.5.1 Populasi.....	29
3.5.2 Sampel	30
3.6. Metode Pengumpulan Data	30
3.7. Metode pengolahan/ atau Analisis Data	31
3.7.1 Validitas dan Reliabilitas	31
3.7.2 Metode Pengolahan Data	34
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.4 Uji Hipotesis	37
3.7.5 Analisis Regresi Linier Bergandaa	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bogor	40
4.1.2 Visi dan Misi Desa Cipambuan	41
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Cipambuan.....	42
4.2 Deskripsi Penelitian.....	42
4.2.1 Transparansi.....	43
4.2.2 Akuntabilitas	44
4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat	45
4.3 Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1 Uji Normalitas.....	46
4.3.2 Uji Multikolinieritas	48
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.4 Uji Hipotesis.....	51
4.4.1 Uji Determinasi.....	51
4.4.2 Uji Parsial (T)	51
4.4.3 Uji F.....	53
4.5 Pembahasan	54
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian	55
4.6.1 Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan.....	56
4.6.2 Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan.....	56
4.6.3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. KESIMPULAN	58
5.2. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.2 Kerangka pemikiran.....	24
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel 3.2 Uji Validitas.....	31
Tabel 3.3 Uji Reliabilitas.....	34
Tabel 3.4 Skala Likert.....	34
Tabel 3.5 Tafsiran Nilai Rata-Rata.....	36
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	42
Tabel 4.2 Skor Rataan Transparansi (X1).....	43
Tabel 4.3 Skor Rataan Akuntabilitas (X2).....	44
Tabel 4.4 Skor Rataan Pemberdayaan Masyarakat(Y).....	45
Tabel 4.5 Hasil Output Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas.....	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi.....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	51
Tabel 4.11 Hasil Output Uji Keterandalan Model(UjiF).....	54
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas Data Histogram dan Data Probability Plot..	47
Gambar 4.2 grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005).

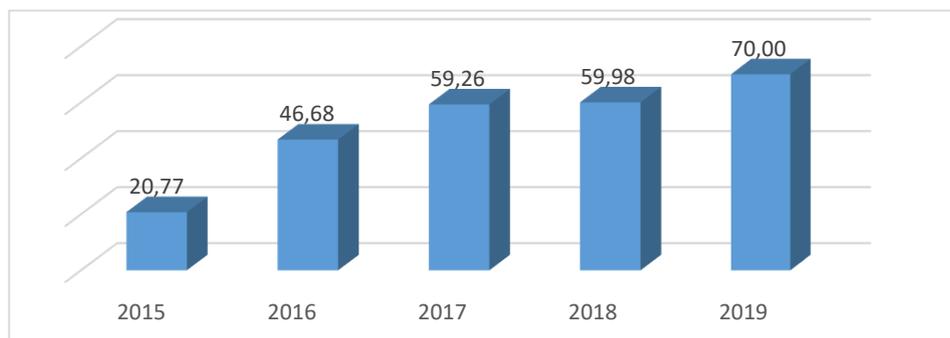
Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua:* kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga:* rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat:* bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mulai memperhatikan pembangunan bangsa Indonesia ini. Hal tersebut berupa kenaikan pemerataan yang dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan sektoral serta pemberdayaan masyarakat, khususnya warga pedesaan. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga mulai mengalokasikan Dana Desa. Dana tersebut sebagai dana desa. Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dana Desa tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut diadakan sebagai wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Direktorat, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang salah satunya mengamankan kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagai bagian postur APBN, pemerintah telah merealisasikan Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 256,9 triliun. Secara rinci realisasi dan pengalokasian Dana Desa pertahunnya dapat di lihat dari grafik berikut:

Ket. : Dalam Triliun Rupiah



Tabel 1 - Alokasi Dana Desa

Sumber: DJKP Kementerian Keuangan, diolah tahun 2020 adalah anggaran yang ditetapkan berdasarkan UU 12/2018.

Presiden menyebut kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa. kehadiran dana desa dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau *entrepreneurship*. Menurut Presiden Joko Widodo Dana Desa pada tahun 2020 ini akan dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Dan penggunaan Dana Desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina Ika Sasti, Burhanuddin, 2016).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi, dimana kinerja yang akan menjadi lebih baik karena *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan mengarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan. Pemerintahan yang baik memiliki tiga prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatis. Akuntabilitas merupakan suatu unsur utama yang harus ada dalam pemerintahan yang baik.

Dalam sistem pengelolaan dana desa akuntabilitas dimaksudkan juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip dari akuntabilitas sendiri ialah melaporkan tiap aktivitas serta hasil dari aktivitas tersebut yang wajib dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. dalam pemerintahan yang baik akuntabilitas dibutuhkan terdapat juga faktor transparansi yang tidak boleh dilewatkan bagaikan satu kesatuan yang harus ada di dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik (Dilago, 2018).

Apabila transparansi diterapkan maka akan menimbulkan ikatan antara masyarakat serta pemerintah yang baik sehingga pemerintah juga tidak segan untuk sediakan informasi kepada masyarakat dengan menjamin akan

mempermudah dalam mendapatkan informasi secara akurat. Bila dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi merupakan sesuatu keadaan dimana pemerintah harus terbuka mengenai keuangan ataupun non keuangan kepada masyarakat terkait seluruh kegiatan yang dilakukan serta keputusan- keputusan yang harus diambil oleh pemerintah dalam penerapan urusan publik (Nurbaeti, 2020).

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas masyarakat merupakan bentuk dukungan pelaksanaan dan kelancaran di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah agar berlangsung berhasil, bersih dan bertanggungjawab dan tidak ada lagi tindak penyelewengan yang akan terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi dan Akuntabilitas tersebut sangatlah penting dilakukan, karena dana tersebut dikelola adalah dana yang digunakan untuk seluruh masyarakat. Akan tetapi banyak desa yang belum melakukan dan melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak ada upaya lain yang dilakukan dalam melaksanakan penerapan transparansi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan asa-asa pengelolaan keuangan desa tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Dengan terdapatnya masyarakat yang berdaya, diharapkan hendak tingkatkan pemasukan desa yang secara otomatis hendak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Tahir, 2018). Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan supaya masyarakat lebih proaktif serta paham terhadap kemampuan yang dimiliki wilayah dan/ ataupun desa tersebut. Sehingga, alokasi anggaran bisa terserap dengan maksimal serta lebih berguna dalam pengembangan desa, bahkan daerah serta negara.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya, alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 1 Ayat 10). Desa Cipambuan merupakan desa yang berada di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan jumlah kurang lebih 4831 jiwa. Desa Cipambuan merupakan desa terkecil di wilayah Kecamatan Babakan Madang di lihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sedikit. Sehingga adanya program dana desa harusnya desa tersebut bisa menjadi desa yang unggul dalam memberdayakan masyarakatnya. Alokasi dana desa di Desa Cipambuan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembiayaan modal awal dan pengadaan peralatan penunjang untuk UKM, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bidang sarana umum, bidang pendidikan, bidang pemerintah, bidang pemuda dan olahraga.

Permasalahan yang ditemui peneliti di Desa Cipambuan yaitu infrastruktur sarana kesehatan yang masih minim bagi masyarakat, kemudian sarana transportasi jalan desa yang masih buruk dan prasarana pendidikan yang kurang menunjang. Selain itu masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Matia (2019), syafi'i (2018), sugista (2017), dan Garung (2020) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erni (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan pengaruh positif dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul "**Pengaruh**

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor”.

1.2. Identifikasi Masalah Perumusan Masalah dan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ditemui peneliti di Desa Cipambuan yaitu infrastruktur sarana kesehatan yang masih minim bagi masyarakat, kemudian sarana transportasi jalan desa yang masih buruk dan prasarana pendidikan yang kurang menunjang. Selain itu masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah Desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan masyarakat.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Kegunaan Akademis
Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, terutama yang berhubungan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 tahun 2014, n.d.)

2.1.1. Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Menurut Sedarmayanti Pengertian *Good Governance* secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman yaitu pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Word bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo: 2018)

(Mardiasmo: 2018) pengertian *good governance* sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Kemudian UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. *Rules of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dan dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang bersangkutan.
4. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

2.2. Dana Desa

2.2.1. pengertian Dana Desa

Menurut peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Undang-Undang desa telah menetapkan bahwa desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan

kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat (UU No. 6 tahun 2014, n.d.).

Hal penting yang terdapat dalam penerapan pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat merupakan perlunya melaksanakan aktivitas dengan pola swakelola, memakai tenaga kerja setempat, serta memanfaatkan bahan baku lokal yang terdapat di desa. Dengan pola swakelola tersebut, berarti diupayakan perencanaan serta penerapan aktivitas tersebut dicoba secara mandiri oleh desa, sehingga yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir ke luar desa. Dengan memakai tenaga kerja setempat, diharapkan penerapan aktivitas tersebut dapat meresap tenaga kerja serta membagikan pemasukan untuk mereka yang bekerja. Sedangkan pemakaian bahan baku lokal diharapkan akan memberikan pemasukan kepada warga yang mempunyai bahan baku tersebut.

Agar peraturan Undang-Undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu dilakukan penyesuaian serta penataan kebijakan departemen yang ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu pemerintah merancang keputusan bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Desa Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengelokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota dan desa. (Dewi Icha Shintia, 2019).

2.3.3. Tujuan Dana Desa

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini bila dijabarkan merupakan buat tingkatkan

kesejahteraan warga yang terdapat di desa, membetulkan mutu hidup manusia serta/ ataupun warga desa, dan mengatasi kemiskinan lewat pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan fasilitas serta prasarana desa, meningkatkan kemampuan ekonomi lokal, ataupun dalam menggunakan sumber energi alam yang berkepanjangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tujuan Dana desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Heru, 2014).

2.3. Transparansi

2.3.1. pengertian Transparaan

Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan pemerintah dan masyarakat melalui keterbukaan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya nya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut (Lalolo, 2003) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang di capai.

Transparansi merupakan salah satu indikator yang paling penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Transparansi juga termasuk salah satu prinsip *Good Governance*. Dalam melaksanakan mandat dari rakyat, transparansi ialah

perihal yang berarti dalam melaksanakan tugas serta guna pemerintahan. Dalam melaksanakan mandat dari rakyat, transparansi ialah perihal yang berarti dalam melaksanakan tugas serta guna pemerintahan. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap dan keterbukaan mengenai apa yang dikerjakan, menjadi kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan secara benar dan bijak. Sesuai dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan hingga kebohongan yang terjalin akan sulit untuk dirahasiakan. (Dilago, 2018)

Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.37 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dengan terdapatnya transparansi menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang untuk mendapatkan data tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni data tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya, dan hasil- hasil yang dicapai.

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

1. Hak untuk mengetahui
2. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
3. Hak untuk mengemukakan pendapat
4. Hak untuk memperoleh dokumen

2.3.2. Prinsip Transparansi

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Setidaknya ada 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarium Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati 2014 yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.3.3 Indikator Transparansi

Menurut Kristianten (2006), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berdasarkan indikator di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
2. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.
3. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

2.4. Akuntabilitas

2.4.1. Pengertian Akuntabilitas

Asas pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No 113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Iznillah et al., 2018) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau pemimpin yang

menyangkut pertanggungjawaban dan mampu menjawab hal-hal yang menyangkut pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam perekonomian sesuatu negeri dari para pemangku kekuasaan. Terpaut perihal tersebut akuntabilitas keuangan khususnya daerah, tanggung jawab pemerintah daerah supaya laporan keuangan harus diterbitkan kepada pemangku kepentingan.

Menurut (Sugista, 2017) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau pun menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ pimpinan sesuatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun yang berwenang memohon pertanggungjawaban berbentuk hasil laporan dengan prinsip bahwa tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa mesti bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, cocok dengan peraturan perundang-undangan serta menggambarkan perihal yang bernilai untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, daya guna serta reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, sampai realisasi ataupun penerapan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan sampai pengawasan dalam kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang sesuai dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik hasilnya kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan terdapatnya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam penerapan tugas serta fungsinya akan terukur. Kinerja sesuatu organisasi bisa nampak dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang sudah tersusun, ataupun kebijakan lain yang sudah diresmikan. Oleh sebab itu, dengan terdapatnya akuntabilitas diharapkan bisa memberikan mutu dan kinerja dari lembaga pemerintah supaya jadi pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada kepentingan publik dan hendak mengatakan seluruh wujud penyelewengan wewenang yang bisa diawasi serta dikontrol oleh warga.

2.4.2 Indikator akuntabilitas

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
4. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
2. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
4. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

2.5. Pemberdayaan masyarakat

2.5.1. Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Empowerment berasal dari bahasa inggris yang artinya pemberdayaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual.

Menurut Sedarmayanti (2013) secara harfiah, kata pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang,

tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. *Empowerment* merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Sedarmayanti 2014)

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Soeharto 2006). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
2. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu

profesi mulia sebagai agen perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013)

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ayat 1 Bab 1 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran serta masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong berkembangnya usaha kecil, menengah, koperasi, memberikan modal usaha dengan nisbah bagi hasil yang rendah, memberikan kesempatan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha, membekali pengetahuan dan/atau keterampilan yang dibutuhkan, dan juga menyediakan informasi pasar dan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan standar hidup yang lebih sejahtera.

2. Pemberdayaan masyarakat dari segi sosial.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dari segi sosial, diharapkan akan memperkuat ketahanan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat lainnya yang sedang mengalami kesulitan, musibah, bencana, dan sebagainya. Dalam sisi sosial ini, masyarakat dapat menerapkan upaya untuk gotong royong.

3. Pemberdayaan masyarakat dari segi politik.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik sangat penting dilakukan karena era reformasi saat ini sangat mengedepankan

demokrasi yang demokratis, transparan, dan juga akuntabel. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi masyarakat kepada wakil-wakil rakyat harus dilaksanakan dengan baik.

2.5.2 Indikator pemberdayaan masyarakat

Menurut Soeharto (2005) secara umum indikator pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif.

Dalam penelitian ini, Indikator untuk mengukur pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan
2. Kepercayaan
3. Wewenang
4. Tanggungjawab.

2.6. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil
1.	Rizki Amalia Sugista	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pembangunan Desa (Y)	X1: - Mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi - Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik	Penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi

		<p>n keuangan Desa Terhadap Pembangun an Desa (Studi Empiris di Kota Lampung Selatan)</p>		<p>- Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi</p> <p>X2:</p> <p>- Tercapainy a tujuan dalam pengelolaa n keuangan desa</p> <p>- Pengawasa n oleh tim pelaksana</p> <p>- Adanya laporan pertanggung gjawaban</p> <p>X3:</p> <p>- Keterlibata n dalam perencana an pembangu nan</p> <p>- Keterlibata n dalam pelaksanaa n pembangu nan</p> <p>- Mengguna kan dan memanfaat kan hasil pembangu nan</p> <p>- Kesempata n masyaraka</p>	<p>masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pembangun an Desa</p>
--	--	---	--	--	--

				<p>t melakukan pengawasa n</p> <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan - pendidikan 	
2.	Erni Tahir	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaa n dan Peningkatan Kesejahteraa n Masyarakat	Alokasi Dana Desa(X1), Pemberday aan (Y1), Peningkat an Kesejahter aan (Y2)	<p>X1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparan si - Akuntabilit as - Partisipasif <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampua n - Kepercayaan - Wewenang - Tanggung jawaban <p>Y2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadilan sosial - Keadilan Ekonomi - Keadilan Demokrasi 	Penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdaya an masyarakat dan peningkatan kesejahteraa n masyarakat
3.	Christ a Yunit a Garun g, dkk.	Pengaruh Akuntanbilita s dan Transparansi Terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian <i>Good</i>	Akuntabili tas dan Transpara nsi (X1), Pengelolaa n Alokasi Dana Desa (Y),	<p>X:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pertanggung g jawaban - keterbukaa n <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akuntabilita s - transparansi - partisipasif 	Akuntabilita s dan Transparans i secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana

		<i>Governance</i> pada Desa Manula, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka			desa sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manule, Kabupaten Sasitamean Malaka
4.	Matia Andriani	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)	Transparansi(X1), Akuntabilitas(X2), Partisipasi Masyarakat (X3), pengelolaan Dana Desa(Y)	X1: - keterbukaan dalam informasi X2: - adanya laporan pertanggung jawaban dan ketercapaian tujuan pengelolaan keuangan desa X3:	Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa

				<p>- keterlibatan masyarakat</p> <p>Y:</p> <p>- perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban</p>	
5.	Kristina Korniti Kila	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (X1)	<p>X1:</p> <p>- Proses Perencanaan yang dimusyawarahkan</p> <p>- Pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah</p>

					(Musrembang-Desa), pada proses pelaksanaan anggaran/kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya .
6.	Rina Inrawati Syafiidkk.	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa(X1), Kebijakan Desa(X2), Kelembagaan Desa(X3), Pemberdayaan Masyarakat(Y)	<p>X1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan , pelaksanaan - Penatausahaan, pelaporan - Pertanggung jawaban keuangan desa <p>X2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan desa secara struktur <p>X3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah desa <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kemandirian masyarakat 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

2.6.2. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat:

1. Pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Transparansi merupakan keterbukaan tentang segala informasi kepada masyarakat, serta jika masyarakat memerlukan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah maka masyarakat dengan mudah dapat memperoleh informasi tersebut. Terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana desa ini dapat memudahkan pihak yang berwenang untuk mengawasi proses pengelolaan dana tersebut sehingga dana desa yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dapat terwujud secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Erni Tahir (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

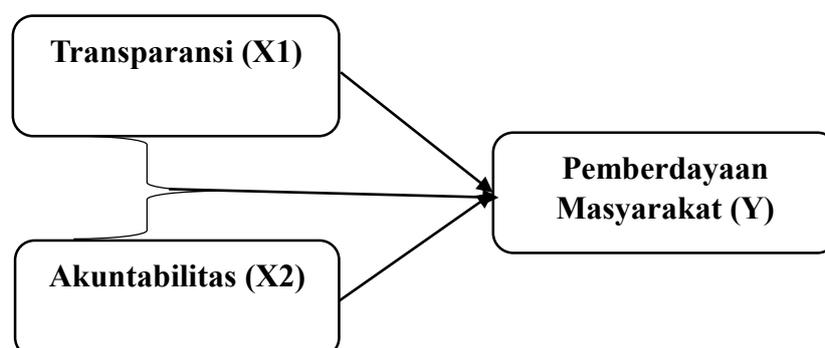
2. Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana untuk digunakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan dari penggunaan dana desa tersebut yakni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu upayanya dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Rina Indrawati syafi'i, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 2.2

Kerangka pemikiran



- Pengaruh X1 dan X2 secara parsial terhadap Y
- Pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y

2.7. Hipotesis Penelitian

- H1 : Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.
- H2 : Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.
- H3 : Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan pendekatan penelitian yang tepat. Hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan verivikatif. dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari variabel itu dengan variabel lain. Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2013) adalah Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif verifikatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Pada penelitian ini metode deskriptif verifikatif digunakan untuk meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Cipambuam Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

3.2. Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap

Pemberdayaan Masyarakat khususnya pada Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Unit analisis yang saya teliti adalah Badan Permusyawaratan Desa/ Tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Lokasi dari penelitian saya adalah di Kabupaten Bogor tepatnya di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Jalan Raya Babakan Madang No.67, Sentul, Kabupaten Bogor.

3.3. Jenis dan sumber data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan variabel Y yaitu pemberdayaan masyarakat dan variabel X yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data dimana data tersebut diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dari lokasi penelitian yaitu desa cipambuan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder disebut juga sumber data penunjang data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari objek penelitian, tetapi hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain. Sambas dan Maman (2007). Sumber sekunder dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber lain, yakni buku-buku yang menunjang, karya ilmiah maupun dokumen yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala pengukuran
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah masyarakat 2. Keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan 3. Keterbukaan mengenai pertanggungjawaban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. 2. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan. 3. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban 	Ordinal
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketercapaian tujuan pengelolaan Dana Desa 2. Keterlibatan pemerintah 3. Pengawasan tim pelaksana 4. Laporan pengelolaan Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam satu tahun anggaran. 2. Adanya keterlibatan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. 	Ordinal

		3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana	
Pemberdayaan Masyarakat	1. Kemampuan 2. Kepercayaan 3. Wewenang 4. Tanggung Jawab	1. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan berbagai teknologi. 2. Kepercayaan masyarakat dalam program Dana Desa. 3. Wewenang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. 4. Masyarakat diberikan Tanggung jawab mengenai pengelolaan Dana Desa.	Ordinal

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya (Sugiyono 2013).

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa/ Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang telah memiliki hak suara dan/atau telah berumur 17 tahun. Penentuan populasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat yang

telah berumur 17 tahun telah dianggap dewasa dan telah cakap hukum. Pertimbangan pemilihan tempat, karena daerah itu merupakan tujuan penyaluran alokasi dana desa. Jumlah penduduk desa Cipambuan berdasarkan data kependudukan desa Cipambuan berjumlah 4831.

3.5.2 Sampel

Metode penarikan sampel terkategoriikan *probability random sampling* dengan menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengambilan data tidak mempertimbangkan perbedaan, sehingga semua masyarakat yang menjadi target program dana desa di Kelurahan cipambuan berhak menjadi responden. Sampel dari penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus *slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10%)

$$n = \frac{4831}{1 + 4831(0,1)^2}$$

$$n = 97$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah responden yang akan diambil adalah sebanyak 97 orang. Namun peneliti akan membulatkan pengambilan sampel menjadi 100 orang.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Sambas dan Maman (2007) yaitu cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Prosedur pengumpulan data yang tepat, dan sesuai dengan karakteristik penelitian yang digunakan akan memberikan gambaran yang akurat mengenai suatu kondisi tertentu. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam menyusun suatu

informasi yang berguna dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi perpustakaan merupakan salah satu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan berdasarkan buku dan literatur yang diperlukan, sehingga diperoleh pengertian teoritis untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan riset yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan mengambil data laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan publikasi dari perusahaan dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

4. Internet

Mengambil data atau teori dari internet.

3.7. Metode pengolahan/ atau Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS 25). Metode yang digunakan adalah menganalisis data dengan langkah-langkah yaitu Uji asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Analisis Regresi Linear Berganda.

3.7.1 Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu alat yang menunjang tingkat keandalan suatu alat ukur (Unardjan, 2013). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan validitas isi, yaitu berkaitan dengan kemampuan suatu instrument mengukur isi (konsep) yang harus diukur. Ini berarti bahwa

suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Product Momen Person* dengan rumus:

$$r = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Jumlah koefisien korelasi

N= Banyaknya individu dalam sample

x= Variabel independen

y= Variabel independen

n= Jumlah responden

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan kepada 20 orang masyarakat desa Cipambuan diperoleh hasil bahwa sebagian besar indikator dalam kuesioner valid atau teruji dengan nilai lebih dari 0,444.

Tabel 3.2 Uji Validitas

Pernyataan	rhitung	rtabel 5% (20 Responden)	Sig	Kriteria
Transparansi				
X1.3	0,746	0,444	0	Valid
X1.5	0,536	0,444	0,015	Valid
X1.7	0,753	0,444	0	Valid
X1.8	0,742	0,444	0	Valid
X1.9	0,559	0,444	0,01	Valid
X1.10	0,471	0,444	0,036	Valid
X1.11	0,6	0,444	0,005	Valid
X1.12	0,719	0,444	0	Valid
X113	0,538	0,444	0,014	Valid
Akuntabilitas				
X2.5	0,473	0,444	0,035	Valid
X2.6	0,7	0,444	0,001	Valid
X2.7	0,775	0,444	0	Valid
X2.8	0,682	0,444	0,001	Valid
X2.10	0,575	0,444	0,008	Valid
X2.12	0,589	0,444	0,006	Valid

X2.14	0,66	0,444	0,002	Valid
X2.18	0,652	0,444	0,002	Valid
Pemberdayaan Masyarakat				
Y1.4	0,732	0,444	0	Valid
Y1.5	0,807	0,444	0	Valid
Y1.7	0,58	0,444	0,007	Valid
Y1.9	0,51	0,444	0,022	Valid
Y1.10	0,719	0,444	0	Valid
Y1.14	0,608	0,444	0,004	Valid
Y1.15	0,449	0,444	0,047	Valid
Y1.17	0,536	0,444	0	Valid
Y1.19	0,476	0,444	0	Valid

Sumber: Data Primer, 2021

Dari hasil uji validitas seperti yang telah di sajikan tabel di atas menunjukkan bahwa pertanyaan yang di ajukan valid. Artinya tiap pertanyaan berkorelasi dengan skor totalnya dan semuanya di nyatakan valid yang berjumlah 20 pertanyaan karena r hitung lebih besar dari r tabel (0,444) pada taraf signifikasi 5%.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivisik, suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2013).

Dalam penelitian ini tiap variabel dilakukan penelitian reliabilitas yang menggunakan perhitungan *alpha cronbach* digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Pengujian reliabilitas dengan teknik *alpha croanbach* dilakukan untuk jenis data interval atau esai. Rumus koefisien reliabilitas *alpha croanbach*:

$$r_i = \frac{k}{(k - 1)} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_b^2} \right)$$

Keterangan :

- r_{11} = Reliabilitas instrumen
 K = Mean kuadrat antara subyek
 σ_b^2 = Varians total
 $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

Tabel 3.3 Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alfa	Cronbach Alpha	Interprestasi
Transparansi	0,772	0,600	Reliabel
Akuntabilitas	0,726	0,600	Reliabel
Pemberdayaan masyarakat	0,623	0,600	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2021

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien lebih besar dari 0,6, jadi seluruh item pertanyaan dapat di nyatakan reliabel. Sesuai dengan pendapat (Sugiyono 2013) menyatakan bahwa pertanyaan kuesioner reliabel jika nilai Kofisien Alpha lebih dari 0,6. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa semua bulir pertanyaan yang telah di berikan reliabel.

3.7.2 Metode Pengolahan Data

Pertanyaan mengenai Transparansi, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat akan diukur dengan menggunakan skala Likert dan diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Likert

SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Total dari nilai jawaban setiap butir pertanyaan kemudian dibulatkan rentang skala untuk mengetahui tanggapan total responden. Dengan rumus sebagai berikut :

- Tanggapan Total Responden Menggunakan Skala Likert :

$$\text{Variabel} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian}}{\text{Jumlah Skor ideal (kriterium) untuk seluruh item}} \times 100 \%$$

Setelah diketahui tanggapan total responden, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata indeks variabel bebas dan tidak bebas untuk mengetahui bagaimana keadaan variabelnya.

Hasil jawaban responden kemudian dikelompokkan dalam setiap kriteria, lalu dikaitkan dengan bobotnya. Hasil perkalian dalam setiap kriteria dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah respondennya. Sehingga diperoleh suatu nilai skor rata-rata yang berada pada skala 1 sampai 5. Metode rata-rata skor digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Langkah-langkah dalam metode rata-rata menurut Umar (2011) adalah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan frekuensi jawaban berdasarkan bobot dalam skala kuesioner.
2. Melakukan perhitungan skor dengan rumus sebagai berikut: Skor = (Frekuensi Jawaban x Bobot Skala)
3. Frekuensi jawaban didapat dari hasil pengelompokkan jawaban yang sama, kemudian dikaitkan dengan skala dan masing-masing kelompok tersebut dijumlahkan. Dari langkah tersebut diperoleh jumlah skor.
4. Mencari nilai rata-rata skor yang didapatkan dengan rumus:
5. Nilai Rataan Skor = $\frac{\text{Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$
6. Menerjemahkan rata-rata skor persepsi ke dalam ruang kriteria. Rumus rentang kriteria adalah sebagai berikut:
7. $RK = \frac{(m-n)}{k}$

Keterangan :

- RK : Rentang Kriteria
 m : Skala Jawaban Terbesar
 n : Skala Jawaban Terkecil
 k : Jumlah Kelas

Dalam penelitian ini, nilai m yang akan dihitung rentang kriterianya adalah 5. Nilai n adalah 1 dan nilai k adalah 5. Berdasarkan data diatas, maka didapat rentang kriteria persepsi sebagai berikut:

$$RK = (5-1) : 5 = 0,8$$

Tabel 3.5 Tafsiran Nilai Rata-Rata

Interval	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Cukup
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono (2016)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Priyatno (2013) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak dengan rumus sebagai berikut: $D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$. Kriteria pengambilan keputusan dapat dikatakan apakah data distribusi normal atau tidak melalui pernyataan sebagai berikut: Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal. Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi yaitu dengan menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* tersebut harus terbentuk

diatas 0.10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang terbentuk harus kurang dari 10 (Ghozali, 2012:105).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Menurut Priyatno (2013) model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dilakukan dengan melihat titik-titik pada *Scatterplots* dan Uji Glesjer. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. *Scatterplots* dapat dilihat melalui output regresi yang dihasilkan. Sedangkan Uji Glejser dapat dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual ($AbsU_i$) terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun periode sesudahnya. Menurut Dwi Priyanto (2012) pengertian autokorelasi adalah “keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode tertentu (t) dan pada periode sebelumnya ($t-1$), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan metode Durbin-Watson”. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Menurut Danang sunyoto (2013) adalah sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau <-2 .
2. Terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau menjadi $-2 < DW < +2$.
3. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas 2 atau $DW > 2$.

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai R^2 berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu $0 < R^2 < 1$. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan *Adjusted R²* karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi tersebut.

2. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2013), uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013), uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika memiliki nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai signifikansinya $< 0,05$.

3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + \mu$$

Keterangan:

Y = Pemberdayaan Masyarakat

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

μ = *Disturbance error*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Desa Cipambuan yang menjadi sampel penelitian dipilih menggunakan metode simple random sampling dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai mana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bogor

Desa Cipambuan berdiri pada tahun 1984 dan pada saat itu dijabat oleh Bpk. R. Machtum Widjaya selama 2 (dua) tahun setelah itu diadakan musyawarah desa LMD dan LKMD beserta tokoh masyarakat, maka terbentuklah panitia pemilihan Pilkades pertama pada tahun 1986, setelah itu terpilihlah kepala desa pertama yaitu R. Machtum Widjaya selama 8 tahun dari tahun 1986 S/D 1994. Setelah Masa Jabatannya habis dari Tahun 1994 S / D 1996 dijabat oleh Bpk. Aripin Bustomi selama 2 tahun setelah itu diadakan kembali pemilihan kepala desa yang ke 2 dan pada saat itu yang terpilih adalah Bpk. H. Endang Bahrudin selama 2 tahun karena tidak sampai 8 tahun maka dijabatkan kembali ke Bpk. H. Supandi Empay selama 1 tahun setelah itu diadakan diadadakan musyawarah desa LMD dan LKMD beserta tokoh masyarakat, maka terbentuklah panitia pemilihan Pilkades yang ke 3 tahun 2000 dan yang terpilih adalah Bpk. Muhamad NJR S / D Tahun 2008 untuk periode pertama dan tahun 2008 diadakan kembali PILKADES ke 4 dan kembali terpilih Bpk. Muhamad Nur sebagai kepala Desa di Cipambuan untuk masa bhakti 2008 s / d 2014. Selajutnya pada Pilkades yang ke 6 pada tahun 2014 terpii kepala Desa yang baru yaitu Bpk Dadang Darajat untuk masa bhakti 2014 sampai dengan 2020, yang saat ini baru menginjak tiga tahun, dan pembangun berjalan sesuai dengan rencana atau program berjalan dengan lancar.

Nama Cipambuan berasal dari kata Cipamoean karena di desa tersebut dulunya sebagian besar masyarakatnya bertani singkong jadi banyak mengolah singkong di desa tersebut, dan istilah kata ci dari bahasa sunda: air, dan pamoean:

kali tempat penjemuran aci singkong hasil dari petani desa Cipambuan. Maka dinamailah Desa Cipambuan. Maka dinamailah Desa Cipambuan sampai sekarang. Menurut cerita sebagian nama orang cipambuan berasal dari dahulunya di cipambuan banyak terdapat pohon durian, dimana buahnya yang wangi selalu di Ambuan yang berarti dicium baunya, maka dengan kebiasaan itu namanya kemudian menjadi Cipambuan.

Letak geografis Desa Cipambuan terletak antara 106, 84 LS dengan luas wilayah 200.645 Ha yang terdiri dari 2 Dusun 4 RW dan 10 P'T dan Desa Cipambuan memiliki batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Kadumunggu
- Sebelah Timur : Desa Citaringgul dan Desa Kadumunggu
- Sebelah Selatan : Desa Cadas Ngampar kec. Suka Raja
- Sebelah Barat: Desa Pasir Laja Kec. Suka raja

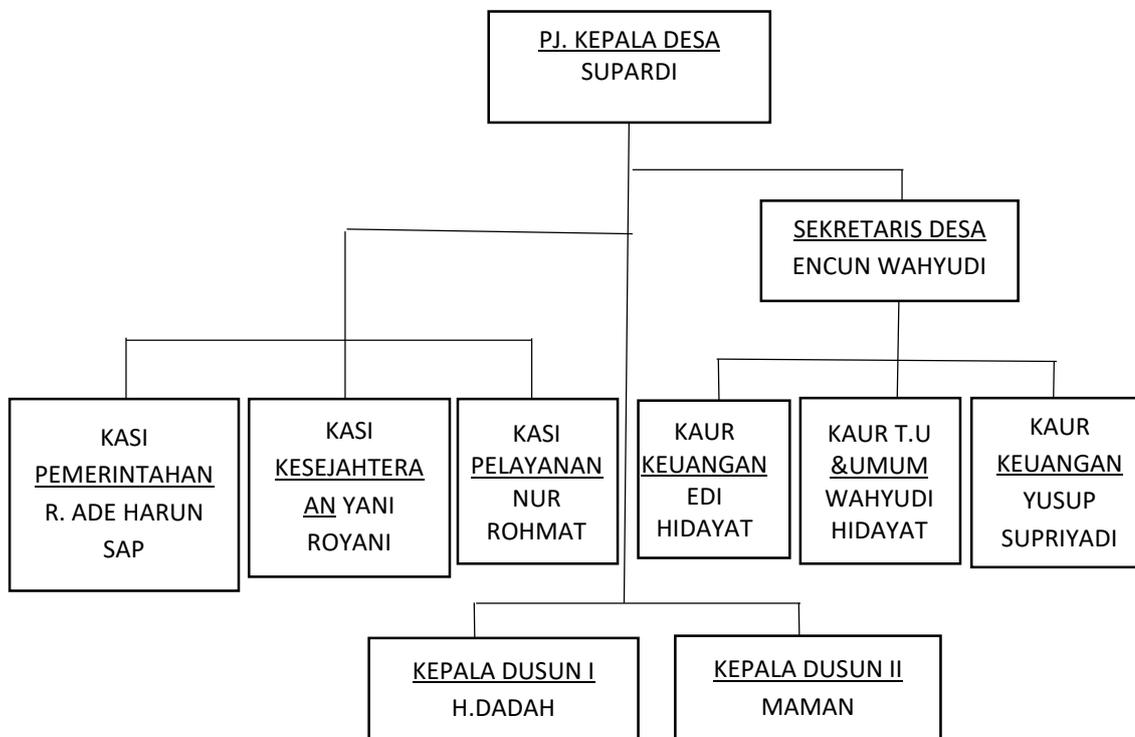
4.1.2 Visi dan Misi Desa Cipambuan

Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi dan misi desa. Adapun visi dan misi desa Cipambuan adalah sebagai berikut:

- VISI "Desa Cipambuan yang mandiri yang menjadi *trend center* bagi desa - desa lain Di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- MISI
 1. Meningkatkan tingkat perekonomian warga
 2. Meningkatkan tarap pendidikan warga
 3. Meningkatkan keamanan lingkungan
 4. Bersih, indah dan nyaman
 5. Terwakili sebagai pintu gerbang Kecamatan Babakan madang

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Cipambuan

Tabel 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : Data Sekunder, 2020

4.2 Deskripsi Penelitian

Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 4831 orang berdasarkan data kependudukan di Desa Cipambuan. Berdasarkan perhitungan jumlah responden yang akan diambil adalah sebanyak 97 orang. Namun peneliti akan membulatkan pengambilan sampel menjadi 100 orang. Responden tersebut diberikan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik probability random sampling yaitu simple random sampling, dimana sampel tersebut merupakan sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

4.2.1 Transparansi

Tabel 4.2 Tabel Skor Rataan Transparansi (X1)

TRANSPARANSI (X1)									
Indikator	P. X	Skala Pengukuran					Rataan	Skor Rataan	
		S S	S	K S	T S	ST S		Nilai	Ket.
X.1 Musyarah Masyarakat	P1	5	6 3	30	2	0	3,71	3,71	Tinggi
	P2	4	6 4	31	1	0	3,71		
X.2 Keterbukaan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan	P3	9	6 7	23	1	0	3,84	3,81	Tinggi
	P4	9	7 6	14	1	0	3,93		
	P5	12	6 3	23	2	0	3,85		
	P6	2	6 7	25	4	2	3,63		
X.3 Keterbukaan Mengenai Pertanggungjawaban	P7	6	7 4	17	3	0	3,83	3,85	Tinggi
	P8	13	5 8	26	3	0	3,81		
	P9	17	5 8	23	2	0	3,90		
Skor Rataan Variabel Transparansi								3,79	Tinggi

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 didapat hasil dari skor rataan penilaian responden mengenai Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Memiliki hasil yang beragam. Pada indikator Musyawarah Masyarakat memiliki skor sebesar 3,71 atau tinggi yang menunjukkan bahwa Musyawarah Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada Keterbukaan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan memiliki skor sebesar 3,81 atau tinggi menunjukkan bahwa Perencanaan dan Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator Keterbukaan Mengenai Pertanggungjawaban memiliki skor sebesar 3,85 atau tinggi hal tersebut

menunjukkan bahwa Keterbukaan Mengenai Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan skor rata-rata untuk Transparansi yang memperoleh skor sebesar 3,79 menunjukkan Transparansi pengelolaan dana desa memiliki nilai yang cukup baik terhadap pengelolaan dana desa.

4.2.2 Akuntabilitas

Tabel 4.3 Tabel Skor Rataan Akuntabilitas (X2)

AKUNTABILITAS (X2)									
Indikator	P.X	Skala Pengukuran					Rataan	Skor Rataan	
		SS	S	KS	TS	STS		Nilai	Ket.
X2.1 Ketercapaian Tujuan Pengelolaan Dana Desa	P1	7	57	31	5	0	3,66	3,66	Tinggi
X2.2 Keterlibatan Pemerintah	P2	11	57	24	8	0	3,71	3,92	Tinggi
	P3	9	61	24	4	2	3,71		
	P4	21	67	11	1	0	4,08		
	P5	25	67	8	0	0	4,17		
X2.3 Pengawasan Tim Pelaksana	P6	21	69	9	0	0	4,08	4,16	Tinggi
	P7	33	57	10	0	0	4,23		
X2.4 Laporan pengelolaan desa	P8	23	68	8	1	0	4,13	4,13	
Skor Rataan Variabel Akuntabilitas								3,97	Tinggi

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 didapat hasil dari skor rata-rata penilaian responden mengenai Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Memiliki hasil yang beragam. Pada indikator Ketercapaian Tujuan memiliki skor sebesar 3,66 atau tinggi yang menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator keterlibatan pemerintah memiliki skor sebesar 3,92 atau tinggi

menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan dana desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator pengawasan tim pelaksana memiliki hasil nilai 4,16 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tim pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator laporan pengelolaan desa memiliki hasil nilai 4,13 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa laporan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan skor rata-rata untuk Akuntabilitas yang memperoleh skor sebesar 3,79 menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai yang cukup baik terhadap pengelolaan dana desa.

4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4.4 Tabel Skor Rataan Pemberdayaan Masyarakat (Y)

PEMBERDAYAAN MASYARKAT (Y)									
Indikator	P.X	Skala Pengukuran					Rataan	Skor Rataan	
		SS	S	KS	TS	STS		Nilai	Ket.
Y.1 Kemampuan	P1	41	57	1	1	0	4,38	4,47	Sangat tinggi
	P2	57	42	0	1	0	4,55		
Y.2 Kepercayaan	P3	47	53	0	0	0	4,47	4,51	Sangat tinggi
	P4	57	39	4	0	0	4,53		
	P5	55	42	3	0	0	4,52		
Y.3 Wewenang	P6	49	49	2	0	0	4,47	4,39	Sangat tinggi
	P7	34	62	4	0	0	4,30		
Y.4 Tanggungjawab	P8	7	39	19	22	13	3,05	3,33	Tinggi
	P9	9	47	39	5	0	3,60		
Skor Rataan Variabel Pemberdayaan Masyarakat								4,17	Tinggi

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 didapat hasil dari skor rata-rata penilaian responden mengenai Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Memiliki hasil yang beragam. Pada indikator Kemampuan memiliki skor sebesar 4,47 atau sangat tinggi yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Cipambuan memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator Kepercayaan memiliki skor sebesar 4,51 atau sangat tinggi menunjukkan bahwa Kepercayaan dalam pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Cipambuan memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator Wewenang 4,39 atau sangat tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan oleh pemerintah Desa Cipambuan memang cukup baik bagi para masyarakat Desa Cipambuan. Pada indikator Tanggungjawab memiliki skor sebesar 3,33 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa Tanggungjawab yang diberikan pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan skor rata-rata untuk Pemberdayaan masyarakat yang memperoleh skor sebesar 4,17 menunjukkan pengelolaan dana desa memiliki nilai yang cukup baik terhadap masyarakat Desa Cipambuan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan Uji *Kolmogrov Smirnov* untuk mengetahui apakah distribusi data pada setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal
- Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut berdistribusi tidak normal

Pada penelitian ini, uji normalitas data dapat digambarkan melalui tabel berikut:

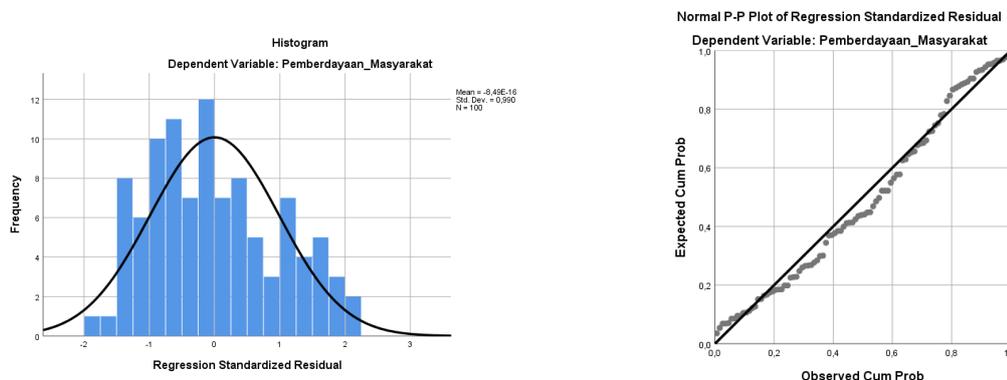
Tabel 4.5 Hasil *Output* Uji Normalitas Data *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,34538569
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,069
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,094 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai dari uji *Kolmogorov* dalam penelitian ini adalah data berdistribusi normal dengan hasil 0,094. Data tersebut menjelaskan bahwa variabel bebas dan variabel terikat dapat saling berdistribusi karena hasil yang diperoleh melebihi kriteria dari uji *Kolmogorov* sebesar $0,094 > 0,05$. Hal tersebut juga dapat di gambarkan pada diagram plot sebagai berikut:

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas Data Histogram dan Data *Probability Plot*



Sumber : Data Primer, 2021

Hasil di atas menunjukkan bahwa garis diagonal dalam grafik

menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Titik-titik yang berada di sekitar garis merupakan keadaan data. Dimana titik-titik tersebut dekat dengan garis dan terlihat ada yang menempel pada garis. Maka dapat disimpulkan jika data mengikuti distribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*variance inflation factor*). Kriteria pengambilan keputusan uji ini yaitu : Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai Tolerance ≥ 10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	41,404	5,738		7,216	,000		
Akuntabilitas	,223	,088	,258	2,526	,013	,797	1,254
Transparansi	,254	,099	,261	2,557	,012	,797	1,254

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Data Primer, 2021

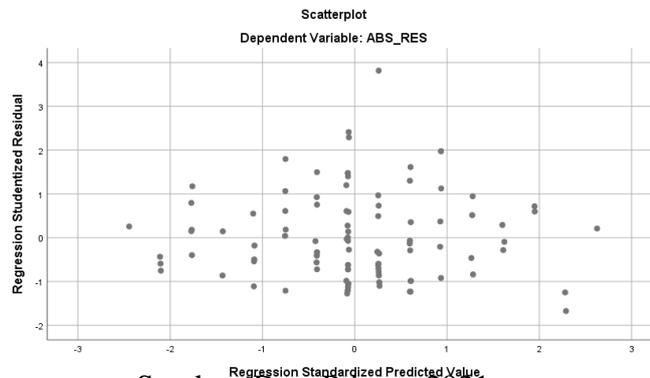
Dari tabel 4.6 dapat dilihat dari model uji hipotesis pada indikator Akuntabilitas memiliki hasil *tolerance* 0.797 dan VIF 1.254. Sedangkan pada indikator Transparansi memiliki hasil *tolerance* 0.797 dan VIF 1.254 yang berarti nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa variabel dari model uji hipotesis terbebas dari masalah multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* menguji terjadinya perbedaan variabel residual dari suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot* regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil di atas, terlihat bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik tersebut menyebar di atas, di bawah atau di sekitar angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Glejser dapat dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,066	,024		2,739	,007
	Transparansi	9,039E-6	,001	,001	,013	,990
	Akuntabilitas	-,001	,001	-,211	-1,910	,059

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa signifikansi (Sig) yang diperoleh pada indikator Transparansi adalah $0,990 > 0,05$. Sedangkan pada indikator Akuntabilitas adalah $0,059 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3.4 Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin – Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

- $d < dL$ **atau** $d > 4-dL$ = Terdapat Auto Korelasi
- $dU < d < 4-dU$ = Tidak Terdapat Auto Korelasi
- $dL < d < dU$ **atau** $4-dU < d < 4dL$ = Tidak Ada Kesimpulan

Berikut hasil perhitungan data DW-Test :

- dL : 1.634
- dU : 1.715
- $4-d$: 2,236
- $4-dU$: 2,285

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,442 ^a	,195	,178	4,390	1,044
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi					
b. Dependent Variable: Pemberdayaan_Masyarakat					

Sumber: Data Primer, 2021

Dilihat dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1.044 dengan kriteria $N=100$, $k=2$, $dL=1.634$, $dU=1.715$, $4-d=2.236$, dan $4-dU=2.285$ yang berarti hasil diantara $d < dL$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data mengalami auto korelasi.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui persentase total variasi dalam setiap variabel. Uji koefisien determinan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam hasil *output* SPSS pada *Model Summary* yang dapat diartikan untuk menjelaskan total variasi antar variabel penelitian.

Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,442 ^a	,195	,178	4,390
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi				
b. Dependent Variable: Pemberdayaan_Masyarakat				

Sumber : Data Primer, 2021

Hasil di atas menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,178 yang mengandung arti bahwa Akuntabilitas dan Transparansi memiliki proposisi pengaruh terhadap komponen Pemberdayaan Masyarakat sebesar 17.8%, sedangkan sisanya 82.2% (100% - 17.8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linier.

4.4.2 Uji Parsial (t)

Menurut Ghozali (2013), uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel maka hipotesis ditolak. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel maka hipotesis diterima.

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41,404	5,738		7,216	,000
	Transparansi	,254	,099	,261	2,557	,012

	Akuntabilitas	,223	,088	,258	2,526	,013
a. Dependent Variable: Pemberdayaan_Masyarakat						

Sumber : Data Primer, 2021

Dari hasil uji t tersebut dikaitkan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, yaitu:

- H1 : Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.
- H2 : Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.
- H3 : Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.

Kriteria penerimaan hipotesis:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Taraf nyata = 5%

Dari hasil tabel di atas diketahui t_{hitung} indikator Transparansi sebesar 2.557 pada sig 0.012 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.660, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.557 > 1,660$) dan sig sebesar $< 0,05$ ($0,012 < 0,05$) maka H_3 ditolak dan H_1 diterima. Dalam hal ini berarti bahwa variabel Transparansi memiliki pengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan pada t_{hitung} indikator Akuntabilitas sebesar 2.526 pada sig 0.013 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.660, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.526 > 1,660$) dan sig sebesar $< 0,05$ ($0,013 < 0,05$) maka H_3 ditolak dan H_2 diterima. Dalam hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat.

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengaruh variabel Transparansi dan Akuntabilitas sebagai variabel independen dan komponen Pemberdayaan Masyarakat sebagai variabel dependen yang dianalisis dengan regresi linier sederhana. Berdasarkan tabel 4.10, nilai konstanta untuk variabel Transparansi dan Akuntabilitas adalah 41.404, sedangkan nilai untuk komponen

Transparansi 0.254 sedangkan pada Akuntabilitas adalah 0.223. Dengan demikian, persamaan regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \mu$$

$$Y = 41.404 + 0.254 X_1 + 0.223 X_2$$

Dimana

Y = Pemberdayaan Masyarakat

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diterjemahkan bahwa:

- Nilai konstanta 41.404 menyatakan bahwa apabila nilai $X = 0$ atau variabel Transparansi dan Akuntabilitas tidak ada, maka nilai Pemberdayaan Masyarakat adalah 41.404.
- Koefisien regresi variabel Transparansi 0.254 dan Akuntabilitas 0.223 berarti menyatakan bahwa setiap penambahan satu point variabel Transparansi dan Akuntabilitas maka nilai Pemberdayaan Masyarakat bertambah sebesar 0.254 dan 0.223.
- Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X1, X2 terhadap variabel Y adalah positif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

4.4.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dan tingkat signifikansi variabel Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Pengaruh dan tingkat signifikansi ini menunjukkan keberartian hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk suatu penelitian.

Tabel 4.11 Hasil Output Uji Keterandalan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	452,835	2	226,417	11,749	,000 ^b
	Residual	1869,355	97	19,272		
	Total	2322,190	99			
a. Dependent Variable: Pemberdayaan_Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi						

Sumber : Data Primer, 2021

Hasil Uji F dilihat pada tabel ANOVA^a, nilai prob. F hitung terlihat pada kolom terakhir (sig). Berdasarkan *output* di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar $0.000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 11.749 > F_{tabel} 3,09$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier tersebut layak untuk menjelaskan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

4.5 Pembahasan

Hasil didasarkan pada penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Hasil dari hipotesis penelitian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H1	Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.	Diterima
H2	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.	Diterima
H3	Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.	Diterima

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel di atas menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak.

1. H1 : Diterima

Variabel Transparansi (X1) terhadap pemberdayaan masyarakat

Terlihat bahwa Transparansi (X1) diketahui t hitung indikator Transparansi sebesar 2.557 pada sig 0.012 dan nilai t tabel sebesar 1.660 , maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.557 > 1,660$) dan sig sebesar $< 0,05$ ($0,012 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Tetapi nilai t hitung memiliki tanda + (positif) yang berarti Transparansi dapat juga memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

2. H2 : Diterima

Variabel Akuntabilitas (X2) terhadap pemberdayaan masyarakat Terlihat bahwa variabel Akuntabilitas (X2) memiliki nilai t hitung indikator Akuntabilitas sebesar 2.526 pada sig 0.013 dan nilai t tabel sebesar 1.660 , maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.526 > 1,660$) dan sig sebesar $< 0,05$ ($0,013 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi nilai t hitung memiliki tanda + (positif) yang berarti Akuntabilitas dapat juga memiliki pengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

3. H3 : Diterima

Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa cipambuan.

Berdasarkan analisis F hitung terlihat pada kolom terakhir (sig). Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar $0.000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 11.749 > F_{tabel} 3,09$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier tersebut layak untuk menjelaskan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada Desa Cipambuan yang menggunakan alat bantu SPSS versi 25 tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, maka peneliti perlu menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan.

Berdasarkan hasil penelitian, Transparansi berpengaruh Positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji t untuk variabel transparansi t hitung sebesar 2.557 dan t tabel sebesar 1.660 dengan sig sebesar $< 0,05$ ($0,012 < 0,05$). Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2.557 > 1.660$) dan pada nilai t hitung terdapat tanda positif, maka Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Rizki Amalia Sugista, Matia Andriani, Christa Yunita Garung, dkk., yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat,

Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Hasil penelitian inipun sejalan dengan grand theory yaitu Teori Good Governance dimana suster kinerja yang akan menjadi lebih baik karena good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan mengarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintah

4.6.2 Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik uji t untuk variabel akuntabilitas diperoleh t hitung sebesar 2,526 dan t tabel sebesar sebesar 1,660 pada taraf signifikan 0,013. Dan nilai signifikansi ($0,013 < 0,05$). Karena nilai t hitung lebih kecil maka thitung $>$ tabel ($2.526 > 1,660$) Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rina Inrawati Syafii (2018) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian pada Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Cipambuan juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan grand theory yaitu Teori Good Governance dimana suster kinerja yang akan menjadi lebih baik karena good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan mengarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintah.

4.6.3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari signifikan uji F yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,000 < 0,05$). Selain itu nilai F hitung $11,749 > F \text{ table } 3,09$. Nilai ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Cipambuan dipengaruhi oleh variabel Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama, seperti yang telah dijelaskan oleh uji regresi penelitian ini. Hasil yang diperoleh peneliti juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki Amalia Sugista (2017) bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Desa Cipambuan juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian dari Transparansi (X_1), Dari hasil tabel 4.10 diketahui t_{hitung} indikator Transparansi sebesar 2.557 pada sig 0.012 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.660 , maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.557 > 1,660$) dan sig sebesar $< 0,05$ ($0,012 < 0,05$) maka H_3 ditolak dan H_1 diterima. Dalam hal ini berarti bahwa variabel Transparansi memiliki pengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari Akuntabilitas (X_2), Dari hasil tabel 4.10 diketahui indikator Akuntabilitas sebesar 2.526 pada sig 0.013 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.660 , maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.526 > 1,660$) dan sig sebesar $< 0,05$ ($0,013 < 0,05$) maka H_3 ditolak dan H_2 diterima. Dalam hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat.
3. Berdasarkan hasil linear berganda menyatakan bahwa, Koefisien regresi variabel Transparansi 0.254 dan Akuntabilitas 0.253 berarti menyatakan bahwa setiap penambahan satu point variabel Transparansi dan Akuntabilitas maka nilai Pemberdayaan Masyarakat bertambah sebesar 0.254 dan 0.253. Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X_1 , X_2 terhadap variabel Y adalah positif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Pada indikator Tanggungjawab variable Y memiliki skor sebesar 3,33 walaupun masuk katagori tinggi namun pada pernyataan.8 ada 13 responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan 22 responden yang

nyatakan tidak setuju dan pernyataan. 9 terdapat 5 responden yang menyatakan tidak setuju hal tersebut menunjukkan bahwa tanggungjawab pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Cipambuan.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya variabel dalam penelitian ini juga dapat lebih diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pertanggungjawaban Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Matia. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa*. [jurnal]. Universitas Teknologi Sumbawa. Tersedia di: <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323> [Diakses 11 November 2020].
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Dewi Icha Shintia. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. [skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Dilago, R. et all. 2018. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa DI Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara*. [jurnal]. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21773> [Diakses 07 Desember 2020].
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Edi Soeharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ferina Ika Sasti, Burhanuddin, H. L. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pemerintah Desa di kabupaten Ogan Ilir*. [Jurnal]. Universitas Sriwijaya. Palembang. Tersedia di: <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991> [Diakses 25 Desember 2020].
- Garung, C. et all. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manule Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka*. [jurnal]. Universitas Nusa Cendana. Tersedia di: <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363> [Diakses 29 Desember 2020].
- Ghojali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heru, R. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi II*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*. [makalah] Lombok Barat.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis*. [jurnal]. Universitas Riau. Riau. Tersedia di: <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6595/5938> [Diakses 16 Desember 2020].
- Kila, Kristina Korniti. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. [jurnal]. Universitas Mulawarman. Tersedia di: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/12/JURNAL%20\(12-21-16-07-27-21\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/12/JURNAL%20(12-21-16-07-27-21).pdf) [Diakses 29 Desember 2020].
- Kristianten. 2006. *Tranparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo, L. K. P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurbaeti. 2020. *Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo*. [skripsi]. Universitas Pancasakti Tegal.
- Payaman J Simanjuntak, 2002, *Masalah Upah dan Jaminan sosial*. Jakarta: LPFE UI.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor.20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Priyanto, Duwi. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta:

Mediakom.

- Rahmawati, Eti Nur. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. [skripsi]. Universitas Jember. Jember.
- Sambas dan Maman. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan jalur dalam penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kauntitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta.
- Sugista, Rizki Amalia. (2017). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Keuangan Desa*. [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Sugista, Rizki. Amalia. 2017. *Pengaruh Transpansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa*. [Jurnal Sosiologi]. Universitas Lampung. Tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28102> [Diakses 02 september 2020].
- Syafi'i, R. et all. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang*. [jurnal]. Universitas Islam Malang. Tersedia di: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/1348/1343> [Diakses 28 Desember 2020].
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyrakat Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*. [skripsi]. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Unardjan, Dolet Dominuskus. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Undang-Undang RI Nomer. 6 tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiatul Adawiyah

Alamat : KP.Cipambun RT01/02,
Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor 16810

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 18 Desember 1999

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SD Sentul 01
- SMP : SMP Daarul Uluum Lido Bogor
- SMA : MA Daarul Uluum Lido Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

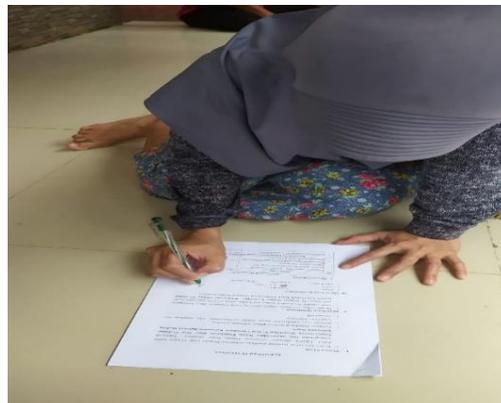
Bogor, 07 Juli 2021

Peneliti,

(Rofiatul Adawiyah)

LAMPIRAN

Lampiran 1.



lampiran 2.



Lampiran 3.


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG
DESA CIPAMBUAN
Alamat: Jl h abu bakar no 7 desa cipambuan

SURAT KETERRANGAN PEMBERIAN IZIN
 NOMOR : 423.4/ /III/2021-pem

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUKHLIS
 Nip : -
 Jabatan : SEKRETARIS DESA CIPAMBUAN

Menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada :

Nama : ROFIATUL ADAWIYAH
 NPM : 022117137
 Universitas : PAKUAN
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Untuk :

Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi tentang " Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor".

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut agar melapor kepada ketua RT dan Ketua RW setempat.
2. Sepanjang melaksanakan kegiatan tersebut , tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan serta social politik.
3. Tidak diperkenankan melaksanakan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan sebagaimana mestinya , dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Cipambuan.

Cipambuan 1 April 2021
An. Kepala Desa Cipambuan
Sekretaris Desa

MUKHLIS

Lampiran 4.

KUESIONER PENELITIAN

I. PENGANTAR

1. Berikut merupakan kuesioner penelitian mahasiswa Program Studi Akutansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor mengenai **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor”**.
2. Kuesioner diedarkan guna mendapatkan informasi penelitian.
3. Jawaban anda diperlakukan sesuai standar profesionalitas, etika penelitian dan terjamin kerahasiaanya.
4. Terimakasih.

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, setiap responden diberi kesempatan untuk memilih satu jawaban dengan memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan pada kolom **SS (Sangat Setuju)**, **S (Setuju)**, **KS(Kurang Setuju)**, **TS (Tidak Setuju)**, **STS (Sangat Tidak Setuju)** sesuai dengan keadaan sebenarnya.

III. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Daftar Pernyataan

A. TRANSPARANSI

Musyawaharah Masyarakat						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.					
2.	Ketersediaan akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang dana desa.					
Keterbukaan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan						
3.	Adanya keterbukaan dalam perencanaan pengelolaan dana desa.					
4.	Adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.					
5.	Keterbukaan informasi mengenai dokumentasi hasil pengelolaan dana desa.					
6.	Adanya informasi mengenai laporan berkala penggunaan alokasi dana desa.					
Keterbukaan Mengenai Pertanggungjawaban						
7.	Adanya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban.					
8.	Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa.					

9.	Keterbukaan informasi mengenai dokumentasi hasil pengelolaan dana desa.					

B. AKUNTABILITAS

Ketercapaian Tujuan Pengelolaan Dana Desa						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Tercapainya tujuan alokasi dana desa					
Keterlibatan Pemerintah						
2.	Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa					
3.	Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa					
4.	Pemerintah desa berperan dalam mendukung keterbukaan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa					
5.	Pemerintah desa hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.					
Pengawasan Tim Pelaksana						

6.	Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa oleh masyarakat.					
7.	Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai relisasi belanja alokasi dana desa.					
Laporan Pengelolaan Dana Desa						
8.	Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan.					

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kemampuan						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.					
2.	Saya bersedia menjaga dan mengaplikasikan hasil dari program dana desa.					
Kepercayaan						
3.	Informasi yang diberikan mengenai pengelolaan dana desa ditanggapi dengan serius oleh masyarakat.					
4.	Saya merasa masyarakat di berikan wewenang dalam menyampaikan aspirasi.					
5.	Setiap masyarakat di berikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan dana desa.					
Wewenang						

6.	Masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan alokasi dana desa					
7.	Masyarakat ikut memberikan masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan alokasi dana desa					
Tanggungjawab						
8.	Pemerintah desa tidak mengalami kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban					
9.	Pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan yang direncanakan					